

**EVALUASI EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SIPD DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PADA DISDUKCAPIL KAB. BATANG**

**Sofiatul Fikriyah<sup>1</sup>, Arochman<sup>2</sup>, Christian Yulianto Rusli<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Institut Widya Pratama Pekalongan

Email Korespondensi: sofi34aa@gmail.com

Email: arochman.aryanta@gmail.com; cyr.tata@gmail.com

**ABSTRACT**

The effectiveness of SIPD implementation at the local government level has not yet been fully realised, despite it being made mandatory under Ministry of Home Affairs Regulation No. 70 of 2019. This study aims to evaluate the effectiveness of SIPD use in the budget preparation process at the Population and Civil Registration Office of Batang Regency. A qualitative case study approach was employed, with data collection conducted through participatory observation, in-depth interviews, and document analysis. Analysis utilised the interactive model by Miles, Huberman, and Saldaña, within the framework of the DeLone and McLean (2003) model, focusing on the dimensions of system quality, information quality, and net benefits. The research findings indicate that the system interface is generally good, but server stability is frequently disrupted during peak budgeting periods. Information output has been standardised nationally, but still requires manual processing and is at risk of human error due to centralisation on two operators. Net benefits in the form of standardisation and automatic validation have been realised, but are not yet optimal due to organisational bottlenecks and technical constraints. It is concluded that SIPD is sufficiently effective but not yet optimal; therefore, improvements are required in infrastructure, workload distribution, and human resource capacity.

**Keywords:** SIPD, System Effectiveness, Regional Budgeting, System Quality, Disdukcapil Batang.

**ABSTRAK**

Efektivitas implementasi SIPD di tingkat perangkat daerah belum sepenuhnya terwujud meski telah diwajibkan melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penggunaan SIPD dalam penyusunan anggaran pada Disdukcapil Kabupaten Batang. Pendekatan kualitatif studi kasus digunakan dengan pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, dengan kerangka acuan model DeLone dan McLean (2003) pada dimensi kualitas sistem, kualitas informasi, dan manfaat bersih. Hasil penelitian menunjukkan antarmuka sistem tergolong baik, namun stabilitas server sering terganggu pada periode puncak penganggaran. Output informasi telah terstandar nasional, tetapi masih memerlukan pengolahan manual dan berisiko terjadi human error akibat sentralisasi pada dua operator. Manfaat bersih berupa standarisasi dan validasi otomatis telah dirasakan, namun belum optimal karena bottleneck organisasi dan kendala teknis. Disimpulkan bahwa SIPD cukup efektif tetapi belum optimal, sehingga diperlukan perbaikan infrastruktur, distribusi beban kerja, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

**Kata kunci:** SIPD, Efektivitas Sistem, Penganggaran Daerah, Kualitas Sistem, Disdukcapil Batang.

**PENDAHULUAN**

Salah satu komponen kunci dalam mencapai tata kelola yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab adalah pengelolaan anggaran daerah. Anggaran daerah merupakan alat strategis untuk merencanakan jalur

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*  
[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

126

Indexed:



pertumbuhan dan menjamin penggunaan sumber daya publik yang sebaik mungkin, di samping berfungsi sebagai dokumen administratif (Alfarishi & Hartati, 2024). Penyusunan anggaran, sebagai alat perencanaan dan pengendalian, sangat penting untuk keberhasilan inisiatif pembangunan, distribusi kesejahteraan publik yang adil, dan peningkatan standar layanan publik di berbagai sector (Puspitasari et al., 2019).

Tahapan dalam pengelolaan anggaran mencakup perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, administrasi keuangan, hingga proses pelaporan dan pertanggungjawaban (Madeten et al., 2025). Setiap tahap tersebut membutuhkan sinergi dan koordinasi yang efektif antarperangkat daerah agar pelaksanaan program berjalan selaras, terhindar dari duplikasi kegiatan, serta mampu menekan potensi pemborosan dana (Ekaputra, 2021). Di tengah meningkatnya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah perlu menerapkan sistem informasi yang terintegrasi untuk menunjang seluruh proses pengelolaan keuangan secara sistematis, akurat, dan tepat waktu (Manoe et al., 2023). Penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat mengurangi kesalahan administrasi, memperluas akses informasi kepada masyarakat, serta memperkuat mekanisme pengawasan baik secara internal maupun eksternal dalam pengelolaan anggaran daerah (Wejak & Huseno, 2025).

Upaya digitalisasi pengelolaan keuangan daerah diwujudkan melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kementerian Dalam Negeri mengatur implementasi sistem ini melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah menggunakan SIPD sebagai platform nasional yang terstandar. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menekankan pentingnya integrasi sistem informasi dalam setiap tahapan penganggaran. Gagasan SIPD adalah untuk menggabungkan prosedur perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan peninjauan kinerja pemerintah daerah (Adiyanti et al., 2025). Sistem ini diharapkan dapat menyederhanakan pelaporan keuangan, meningkatkan akurasi pelacakan anggaran, dan menyinkronkan data antar unit kerja. SIPD diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keteraturan manajemen keuangan daerah sebagai hasil dari standarisasi proses nasional (Amanda & Sudrartono, 2024).

Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa penerapan SIPD terus menghasilkan hasil yang tidak konsisten di berbagai lokasi. Studi ini menemukan bahwa meskipun implementasi SIPD di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Indragiri Hulu mampu mendukung efektivitas pelaporan keuangan, namun masih menghadapi kesulitan teknis seperti ketidakstabilan sistem dan koordinasi yang buruk antar instansi pemerintah daerah. (Adisi & Sadad, 2022). Hasil ini konsisten dengan studi lain yang menunjukkan pentingnya pembagian tugas antar unit kerja dan kesiapan sumber daya manusia dalam keberhasilan penerapan sistem informasi pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara selama kegiatan magang di Disdukcapil Kabupaten Batang, ditemukan adanya perbedaan antara alur kerja ideal SIPD dengan praktik yang berjalan. Secara ideal, setiap bidang menyusun dan mengusulkan rincian kegiatan serta anggaran masing-masing. Namun dalam pelaksanaannya, proses penyusunan dan perincian anggaran cenderung terpusat pada Subbagian Perencanaan, sehingga menimbulkan beban kerja yang tinggi, khususnya pada periode penyusunan anggaran tahunan. Kondisi tersebut diperparah oleh kendala teknis berupa gangguan akses server SIPD pada saat periode penganggaran serentak.

Untuk memahami berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, penting untuk menilai seberapa baik SIPD digunakan dalam penyusunan anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Batang. Diharapkan studi ini akan memberikan ringkasan empiris tentang implementasi SIPD di tingkat SKPD dan menghasilkan saran untuk meningkatkan tata kelola anggaran di tingkat instansi dan sistem pembangunan nasional.

Untuk mendukung siklus pemerintahan daerah secara menyeluruh, Kementerian Dalam Negeri menciptakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sebuah platform digital terintegrasi. SIPD merupakan sistem yang diwajibkan secara nasional yang mencakup modul perencanaan, penganggaran, aset, keuangan, dan pelaporan, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2019. Dengan fitur

validasi otomatis, sinkronisasi anggaran dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPKAD), dan produksi digital DPA-SKPD, modul penganggaran memungkinkan instansi pemerintah daerah (SKPD) untuk membuat rencana kerja (RKA) mereka secara daring.

Model keberhasilan sistem informasi yang dikembangkan penelitian terdahulu merupakan salah satu kerangka teori yang paling banyak digunakan dalam penelitian sistem informasi (DeLone & McLean, 1992). Menurut model ini, efektivitas suatu sistem dapat dievaluasi dari sejumlah sudut pandang, termasuk kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, kepuasan pengguna, tingkat penggunaan, dan manfaat bersih yang dihasilkan. Tidak semua aspek digunakan dalam penelitian ini; sebaliknya, beberapa aspek yang dianggap paling relevan dengan konteks penggunaan SIPD dalam penyusunan anggaran dipilih. Dengan memilih dimensi-dimensi ini, penelitian ini berfokus pada elemen-elemen yang paling sesuai dengan keadaan di mana SIPD diterapkan dalam prosedur perencanaan anggaran lembaga pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara bersama-sama mempertimbangkan dan menyetujui anggaran daerah, yang juga dikenal sebagai APBD, yang pada dasarnya merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah (PP 12/2019). APBD digunakan sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan tata kelola daerah selain sebagai dokumen perencanaan keuangan. Menurut penelitian sebelumnya, APBD memainkan sejumlah peran penting dalam manajemen keuangan publik, termasuk otorisasi, perencanaan, pengawasan, distribusi, alokasi, dan stabilitas (Mardiasmo, 2018). Unit Kerja Daerah (SKPD) telah menghasilkan dua dokumen utama selama proses penyusunan. Pertama, RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran SKPD), yang mencakup informasi tentang proyeksi anggaran serta program, kegiatan, dan indikator kinerja (Peraturan Menteri Dalam Negeri 77/2020). Kedua adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD), yang dibuat setelah pelaksanaan APBD.

## METODE

Untuk memahami sepenuhnya prosedur, keterbatasan, dan efektivitas penggunaan SIPD dalam perencanaan anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Batang, penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus. Pendekatan analitis yang menekankan tiga dimensi—kualitas sistem, kualitas informasi, dan manfaat bersih direkomendasikan berdasarkan penelitian sebelumnya (DeLone & McLean, 2003). Objek penelitian adalah penggunaan SIPD dalam proses penyusunan anggaran, khususnya pada tahap penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas penggunaan sistem dalam mendukung kelancaran proses penganggaran. Penelitian ini dilakukan dari bulan September hingga Desember 2025 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Instansi ini dipilih karena memiliki sistem perencanaan yang aktif dalam memasukkan dan menyusun anggaran serta secara langsung mempekerjakan SIPD dalam proses penyusunan anggaran tahunan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan : observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, terdiri dari Kasubag Perencanaan dan Keuangan, operator SIPD, dan pimpinan instansi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh (Miles et al., 2024). Pendekatan kualitatif, yang menekankan proses analitis berkelanjutan mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan, adalah alasan mengapa model ini dipilih. Pengurangan data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi adalah tiga fase analisis tersebut. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi Teknik untuk memastikan kredibilitas temuan penelitian.

## PEMBAHASAN

### Proses Penyusunan Anggaran Menggunakan SIPD di Disdukcapil Kabupaten Batang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Batang memulai proses perencanaan anggaran dengan menyebarluaskan KUA-PPAS (Peraturan Umum dan Prosedur Pelaksanaan Anggaran), yang dibuat oleh pemerintah daerah berdasarkan observasi dan wawancara. Setiap divisi teknis kemudian diharapkan membuat rencana program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran. Namun pada

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

128

Indexed:



kenyataannya, divisi-divisi ini tidak memberikan informasi spesifik; mereka lebih cenderung mengumpulkan statistik program dan kegiatan secara umum. Hingga ke informasi anggaran spesifik, sub-aktivitas, dan kode akun. Setelah itu, Subdivisi Perencanaan menerima data mentah ini untuk diproses lebih lanjut. Data dari setiap area kemudian diuraikan oleh Subdivisi Perencanaan, yang terdiri dari Kepala Subdivisi dan satu operator. Mereka harus mengubah persyaratan area teknis menjadi struktur anggaran komprehensif yang mengikuti standar SIPD dan mencakup kode akun, sub-aktivitas, dan informasi biaya. Sistem SIPD menerima data setelah data tersebut dideskripsikan.

Menurut informan dari Divisi Perencanaan, "Kami mencantumkan setiap kebutuhan dari setiap industri. Mereka memberikan informasi mentah, yang mencakup aktivitas, program, dan anggaran keseluruhan yang diperlukan. Selanjutnya, kami menguraikannya menjadi detail per item, sub-aktivitas, dan kode akun. Karena hanya dibutuhkan dua karyawan untuk mengelola detail dan input data dari lima hingga enam sektor teknis, pola kerja ini menyebabkan hambatan di Divisi Perencanaan". Prosedur ini menyimpang dari arsitektur SIPD yang optimal, yang seharusnya menyediakan entri data independen oleh setiap divisi. Seorang Kepala Divisi menanggapi pertanyaan tentang mengapa divisi tidak memasukkan data mereka sendiri dengan mengatakan, "Kami memprioritaskan pelayanan publik; masalah anggaran teknis selalu diserahkan kepada divisi perencanaan. Mereka lebih tahu tentang aturan anggaran dan kode akun. Ini menyiratkan bahwa sentralisasi proses disebabkan oleh pembagian fungsi, yang telah menjadi kebijakan organisasi internal, bukan hanya karena ketidakmampuan staf teknis".

## Evaluasi Efektivitas SIPD Berdasarkan Dimensi Kesuksesan Sistem Informasi

### 1. Kualitas Sistem (*System Quality*)

Wawancara dengan informan mengungkapkan temuan yang saling bertentangan mengenai kualitas sistem SIPD. Mayoritas informan melaporkan bahwa antarmuka SIPD sangat ramah pengguna. "Tampilannya cukup jelas, dan ada juga panduannya," kata seorang operator. Selama Anda terbiasa menggunakannya, menu-menunya tidak terlalu rumit. Hal ini menunjukkan bahwa SIPD telah dirancang dengan baik dari perspektif antarmuka pengguna untuk membuatnya mudah digunakan. Namun, stabilitas dan kecepatan akses sistem merupakan masalah utama yang diamati. Menurut hampir semua informan, SIPD sering mengalami gangguan, terutama pada saat anggaran besar ketika semua pemerintah daerah di Indonesia menggunakan sistem tersebut secara bersamaan. Server tampaknya tidak dapat diandalkan."

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang juga menemukan masalah ketidakstabilan server SIPD di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat (Septiani, 2024). Karena SIPD merupakan sistem yang wajib dan tidak memiliki opsi cadangan, ketidakstabilan sistem ini menghadirkan tantangan yang signifikan. Proses penganggaran akan terhenti sepenuhnya ketika teknologi gagal, dan tidak ada rencana cadangan yang tersedia.

### 2. Kualitas Informasi (*Information Quality*)

Temuan studi menunjukkan bahwa SIPD dapat menghasilkan keluaran terstruktur yang sesuai dengan format standar pelaporan keuangan daerah dalam hal kualitas informasi. Dokumen RKA-SKPD dan DPASKPD yang dihasilkan SIPD mengikuti standar nasional, yang memudahkan prosedur verifikasi dan konsolidasi pemerintah daerah. Meskipun demikian, ditemukan sejumlah masalah dengan akurasi data. "Kesalahan input kadang-kadang terjadi, terutama pada kode akun atau angka detail anggaran," jelas kepala subdivisi perencanaan. Karena hanya dua orang yang menangani volume data besar yang perlu dimasukkan, kesalahan manusia tidak dapat dihindari. Kemungkinan kesalahan meningkat karena hanya dua orang yang menangani proses perincian dan input data, yang menyebabkan beban kerja yang berat dan peluang kesalahan yang lebih tinggi.

### 3. Bersih (*Net Benefits*)

Temuan studi mengenai manfaat bersih saling bertentangan. Berbeda dengan prosedur manual sebelumnya, informan mengakui bahwa SIPD menawarkan keuntungan dalam hal standarisasi dan kecepatan pemrosesan. "Dokumen anggaran kami secara otomatis sesuai dengan format nasional dengan

Penerbit:

LKISPOL (*Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik*)  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

129

Indexed:



SIPD," kata kepala lembaga tersebut. Formatnya tidak perlu lagi diubah. SIPD sangat membantu dalam hal ini. "Input ke SIPD lebih cepat daripada metode manual jika server beroperasi dengan lancar," kata operator tersebut. Karena validasi otomatis yang terintegrasi dalam sistem, angka yang bertentangan atau kode akun yang salah dapat diidentifikasi dengan cepat. Akibatnya, lebih sedikit pengeditan bolak-balik yang diperlukan." Diketahui bahwa pada dimensi kualitas sistem (system quality), SIPD di Disdukcapil Batang dinilai memiliki antarmuka yang cukup jelas dan relatif mudah dipahami setelah pengguna terbiasa, namun sering terkendala server yang lambat atau down terutama pada periode puncak penganggaran serta hambatan saat login, sehingga penggunaan sistem terganggu dan pekerjaan menumpuk menjelang tenggat waktu. Meskipun output seperti RKA-SKPD dan DPA-SKPD telah disusun sesuai dengan standar nasional dan datanya disimpan dengan aman, data tersebut masih perlu diproses secara manual di Excel untuk keperluan internal. Hal ini meningkatkan risiko kesalahan input karena hanya dua orang yang menangani volume pekerjaan tersebut. Akibatnya, meskipun informasi formalnya berkualitas baik, informasi tersebut tidak sepenuhnya mendukung kebutuhan analisis internal SKPD. Dalam dimensi manfaat bersih, SIPD mengurangi revisi melalui validasi otomatis, menstandarisasi dokumen, dan mempercepat proses dibandingkan dengan metode manual ketika sistem beroperasi dengan lancar. Namun, manfaat efisiensi ini berkurang karena masalah server dan sentralisasi proses di Sub-Divisi Perencanaan, yang mengakibatkan hambatan, artinya potensi efisiensi tidak optimal dan manfaat bersih yang dirasakan masih parsial.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas SIPD

Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, menurut analisis temuan di atas. Pertama adalah infrastruktur teknologi informasi nasional. Kapasitas infrastruktur yang tidak memadai ditunjukkan oleh ketidakmampuan server SIPD untuk mendukung akses simultan dari seluruh pemerintah daerah selama periode puncak penyusunan anggaran. Pengelola sistem di tingkat pusat harus turun tangan untuk mengatasi masalah ini, yang berada di luar wewenang instansi pemerintah daerah (SKPD). Peneliti terdahulu juga menemukan masalah serupa di Kabupaten Ogan Komering Ulu, menunjukkan bahwa ini adalah permasalahan sistemik yang terjadi di berbagai daerah (Tumija & Erlambang, 2023). Kebijakan internal perusahaan dan unsur budaya berada di urutan kedua. Sentralisasi prosedur di Subdivisi Perencanaan bukan hanya hasil dari ketidakmampuan teknis departemen lain, tetapi juga dari aturan organisasi dan alokasi peran yang sudah lama berlaku. "Ya, bagian perencanaan sudah lama bertanggung jawab atas masalah anggaran," kepala lembaga tersebut mengklarifikasi. Program teknis mereka adalah fokus utama bidang tersebut.

Namun, kita mungkin perlu menilai apakah pola ini masih bermanfaat atau perlu diubah di masa mendatang. Kapasitas sumber daya manusia berada di urutan ketiga. Para informan mengklaim bahwa antarmuka SIPD sangat mudah digunakan, tetapi karyawan lapangan tidak familiar dengan sistem tersebut karena kurangnya pelatihan yang memadai. "Kami belum pernah menerima pelatihan khusus tentang SIPD," kata salah satu anggota staf lapangan. Oleh karena itu, kami tidak yakin bagaimana cara menggunakannya. Karena departemen perencanaan sudah familiar dengannya, kami menyerahkannya kepada mereka. Keempat, elemen desain sistem tidak sepenuhnya dapat disesuaikan dengan persyaratan unik SKPD. Penekanan SIPD yang berkelanjutan pada standarisasi output untuk tujuan pelaporan vertikal, alih-alih memenuhi tuntutan manajemen internal SKPD, ditunjukkan oleh persyaratan pengeditan manual di Excel untuk tujuan analisis internal. Aspek kelima adalah komunikasi dan koordinasi antar unit. Perencana program (bidang teknis) dan pelaksana anggaran (Subdivisi Perencanaan) dipisahkan oleh pola kerja di mana bidang-bidang tersebut hanya mengirimkan data mentah tanpa berpartisipasi dalam proses detail dan verifikasi di SIPD. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman dan perbedaan antara kebutuhan program yang sebenarnya dan dana yang dialokasikan. Sintesis Hasil dengan Struktur Teoretis (Versi Revisi, Disiapkan untuk Pengajaran).

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*  
[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

130

Indexed:



## Sintesis Temuan dengan Kerangka Teoretis

Jika dianalisis menggunakan model kesuksesan sistem informasi (DeLone & McLean, 2003). Di Disdukcapil Kabupaten Batang, efektivitas penggunaan SIPD menunjukkan tren yang kompleks dan non-linear. Model ini menyoroti bagaimana penggunaan dan kepuasan pengguna, yang pada gilirannya menentukan manfaat bersih, dipengaruhi oleh kualitas sistem dan informasi. Kriteria kualitas informasi sebagian besar terpenuhi dalam penelitian ini. SIPD mampu menciptakan catatan anggaran yang akurat, aman, dan seragam secara nasional yang terlindungi dari kehilangan data. Hal ini menunjukkan bahwa sistem beroperasi sesuai dengan yang diharapkan dalam hal keluaran formal. Namun, kualitas sistem—baik dalam hal kecepatan maupun konsistensi akses—tetap menjadi keterbatasan yang signifikan, terutama pada saat penganggaran besar ketika semua pemerintah daerah secara bersamaan menyediakan akses. Seringnya gangguan server menghambat efisiensi operasional proses kerja dan menurunkan efektivitas sistem yang dirasakan.

Menarik untuk dicatat bahwa studi ini menemukan bahwa pola implementasi organisasi memengaruhi efektivitas SIPD di samping pertimbangan teknis. Sentralisasi prosedur masukan dan rincian anggaran di Subdivisi Perencanaan menyebabkan hambatan yang mengakibatkan distribusi pekerjaan yang tidak merata. Kondisi ini menyiratkan bahwa meskipun sistem tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi partisipasi oleh setiap unit kerja, pelaksanaan di lapangan jauh dari desain ideal ini. Namun, sentralisasi ini tidak dapat dipandang sepenuhnya negatif. Sentralisasi dapat menghilangkan kesalahan struktural dalam pembuatan dokumen dan menjaga konsistensi interpretasi kebutuhan anggaran di organisasi layanan publik dengan kapasitas teknis rendah di tingkat sektor. Dengan kata lain, sentralisasi berfungsi sebagai alat kontrol kualitas sekaligus mengurangi efektivitas penyebaran tugas. Penelitian ini menunjukkan adanya kompromi antara efisiensi dan kontrol ketika menerapkan sistem informasi sektor publik. Temuan studi ini mendukung gagasan bahwa efektivitas sistem informasi tidak hanya bergantung pada keunggulan teknisnya, tetapi juga pada seberapa baik desain sistem tersebut sesuai dengan konteks organisasi pengguna. Angka penggunaan dalam sistem yang diwajibkan, seperti SIPD, tidak selalu sesuai dengan kepuasan atau efektivitas yang sebenarnya. Persyaratan peraturan memaksa sistem untuk tetap beroperasi meskipun pengguna menghadapi sejumlah keterbatasan struktural dan teknis.

Secara keseluruhan, SIPD Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang cukup efektif, meskipun belum mencapai potensi maksimalnya. Standardisasi, validasi otomatis, dan keamanan data merupakan beberapa keunggulan yang ditawarkan sistem ini; namun, karena keterbatasan infrastruktur server nasional, kebijakan organisasi internal yang terpusat, dan distribusi kapasitas sumber daya manusia yang tidak merata, keunggulan-keunggulan ini belum sepenuhnya terwujud. Akibatnya, peningkatan efektivitas SIPD memerlukan strategi menyeluruh yang tidak hanya membahas fitur teknologi sistem, tetapi juga restrukturisasi proses kerja organisasi dan penguatan basis pengguna sistem.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan SIPD dalam penyusunan anggaran di Disdukcapil Kabupaten Batang dapat dikategorikan cukup efektif, namun belum sepenuhnya optimal dalam mendukung proses penganggaran secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung kegiatan penyusunan anggaran, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi tingkat efektivitasnya. Dari dimensi kualitas sistem, SIPD dinilai telah memiliki antarmuka yang relatif mudah dipahami oleh pengguna serta mampu mendukung proses penginputan anggaran secara terstruktur. Namun demikian, efektivitas sistem masih terganggu oleh permasalahan teknis, terutama terkait stabilitas dan kapasitas server yang sering mengalami gangguan, khususnya pada periode puncak penyusunan anggaran. Kondisi ini berdampak pada kelancaran proses kerja dan berpotensi menghambat penyelesaian tugas secara tepat waktu.

Pada dimensi kualitas informasi, SIPD mampu menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang telah terstandarisasi secara nasional, memiliki tingkat akurasi

yang baik, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kebutuhan untuk melakukan pengolahan data secara manual guna memenuhi kebutuhan internal organisasi. Selain itu, adanya keterbatasan jumlah operator yang menangani sistem juga menimbulkan risiko terjadinya kesalahan input, terutama ketika beban kerja terpusat pada individu tertentu.

Sementara itu, dari dimensi manfaat bersih, penggunaan SIPD memberikan sejumlah keuntungan, seperti kemudahan dalam proses standarisasi, adanya validasi otomatis, serta peningkatan efisiensi dibandingkan dengan metode manual sebelumnya. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara optimal karena masih adanya hambatan pada aspek organisasi, seperti pembagian tugas yang belum merata, serta keterbatasan infrastruktur yang mendukung operasional sistem. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas penggunaan SIPD ke depan, diperlukan upaya perbaikan secara menyeluruh, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Perbaikan tersebut meliputi peningkatan kapasitas dan stabilitas sistem, optimalisasi pembagian peran dalam organisasi agar tidak terjadi penumpukan beban kerja, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan penggunaan sistem. Dengan langkah tersebut, diharapkan penggunaan SIPD dapat berjalan lebih optimal dan mampu mendukung tata kelola penyusunan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

## REFERENSI

- Adisi, C. A., & Sadad, A. (2022). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mendukung efektivitas pelaporan keuangan daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 5(1).
- Adiyanti, A., Abidin, Z., & Ramadhan, S. (2025). Evaluasi Penerapan SIPD Dalam Penatausahaan Keuangan Di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 12(2), 547–554.
- Alfarishi, A. F., & Hartati, S. (2024). ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PALEMBANG. *EKSISTANSI*, 13(1), 34–44.
- Amanda, C. A., & Sudrartono, T. (2024). Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Laporan APBD Tahun Anggaran 2022 Di Bpkad Kota Cimahi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 1567–1574.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). Information systems success: The quest for the dependent variable. *Information Systems Research*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1287/isre.3.1.60>
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan aplikasi Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen RKPD DI Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(1), 62–79.
- Madeten, E., Lambe, K. H. P., & Baharuddin, B. (2025). Efektivitas SIPD Dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran untuk Peningkatan Kinerja Satpol PP Kabupaten Dogiyai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 51–60.
- Manoe, D. S., Koten, Y., & Rozady, M. P. N. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Bidang Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sikka. *Increate-Inovasi Dan Kreasi Teknologi*, 9(1).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta:ANDI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2024). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. (S. Publication (ed.)).
- Puspitasari, T., Kusumawati, A., & Sujarwoto, S. (2019). Aplikasi Model DeLone and McLean untuk Mengukur Keberhasilan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Brawijaya. *J. Sist. Inf. Bisnis*, 10(1), 94–104.
- Septiani, D. (2024). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. *Esponsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan*, 7(4).

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

132

Indexed:



# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 5 Mei 2026

<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/responsive.v7i4.60881>

Tumija, T., & Erlambang, P. A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Birokrasi*, 5(2).

Wejak, K. C. D. V. L., & Huseno, T. (2025). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Lembata. *Intitut Pemerintahan dalam negeri*.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

133

Indexed:



SINTA 4

